

Pemprov DKI Sambut Positif Penurunan PPKM ke Level 2

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan level PPKM di Jakarta dan sekitarnya.

Kemarin, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, PPKM di Jabodetabek turun ke level 2.

“Terkait PPKM Level 2 yang sudah diumumkan Pak Menko tentu kita bersyukur berterimakasih. Ada penurunan level di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta,” kata Riza di Balai Kota, Senin (7/3) malam.

Di samping itu, Riza mengatakan, Pemprov DKI bakal menyesuaikan aturan teknis PPKM dengan kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, kebijakan penurunan level PPKM di Jakarta sudah tepat. Karena saat ini kasus aktif covid-19 di Jakarta terus menurun. Per Senin (7/3), jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 1.398 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 28.732 (orang yang masih dirawat/isolasi).

Untuk positivity rate DKI juga sudah berangsur menurun dengan angka saat ini adalah 12,1%. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per Senin (7/3) juga mencatat, dilakukan tes PCR sebanyak 30.116 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 27.104 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 2.693 positif dan 24.411 negatif.

Selain itu, dilakukan pula

tes Antigen hari ini sebanyak 43.789 orang dites, dengan hasil 1.894 positif dan 41.895 negatif.

“Ya jelas semuanya menjadi pertimbangan ya, kasus omikron, besaran vaksin semakin baik. Di DKI Jakarta BOR RS turun terus, pasien omikron 4.830 ya. Vaksin dosis 3 sudah 1,4 juta orang atau hampir 1,5 orang,” tandasnya.

100 Persen

Transportasi publik di Jakarta kini diizinkan beroperasi secara 100%. Hal yang sama berlaku di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kenaikan kapasitas 100% ini seiring dengan turunnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 3 ke level 2.

“Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen,” seperti tertulis dalam aturan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2022 tentang PPKM di Jawa dan Bali yang diteken pada Senin (7/3).

Adapun transportasi umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, hingga pesawat terbang dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pertimbangan di balik penurunan status PPKM Level 2 ini karena situasi penyebaran covid-19 yang kian membaik. Selain itu, capaian vaksinasi covid-19 juga yang kian naik. ● yan

FOTO: ANI



PAMERAN LUKISAN FIRDAUS ALAMHUDI

Seorang prajurit TNI AL berada di antara lukisan karya Firdaus Alalhudi yang dipamerkan di Gedung Balai Samudera, Jakarta, Senin (7/3). Sebanyak 80 lukisan karya dari Firdaus Alalhudi bertema ‘Bangkitlah Indonesiaku’ menampilkan sejumlah Alutsista TNI AL, Tokoh Nasional, Kaligrafi, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup tersebut berlangsung hingga 10 Maret mendatang.

JAWAB KELUHAN WARGA

KSOP Marunda Bakal Sediakan Klinik Kesehatan dan Ambulans Gratis

JAKARTA (IM) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda akan mendirikan klinik kesehatan yang melayani warga di kawasan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, KSOP juga akan mengadakan armada ambulans gratis sesuai permintaan warga.

“Harapan warga Marunda memiliki fasilitas layanan kesehatan gratis segera terwujud. Kegiatan akan didukung melalui program CSR sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan pelabuhan Marunda,” kata Kepala KSOP Marunda, Isa Amsyari saat dikonfirmasi, Selasa (8/3).

Dalam penyediaan klinik kesehatan dan ambulans gratis, Isa menjelaskan, KSOP Marunda telah berdiskusi dan mendapati sejumlah perusahaan di area pelabuhan yang sudah berkomitmen dengan hal ini.

“Rata-rata yang saya ajak bicara, menyatakan bermaksud merealisasikan klinik kesehatan dan pengadaan armada ambulans gratis bagi warga. Tidak sekarang minta dan sekarang direalisasikan. Harus dibahas dulu, disusun program per tahun dan bersifat berkelanjutan,” sambungnya.

Isa juga mengatakan jika rencana ini sudah disampaikan kepada warga, terutama di wilayah RW 07 Marunda, seiring dibagikannya paket sembako bekerja sama dengan PT Karya Cipta Nusantara (KCN) yang sudah berperan pencegahan dampak

paparan debu batu bara.

“Mereka memasang jaring cukup tinggi yaitu 15 meter diikuti penyiraman secara rutin terhadap timbunan batu bara serta menggandeng IPPB (Institut Pertanian Bogor) untuk penanaman sejumlah pohon tinggi penahan debu batu bara,” jelasnya.

Isa pun berharap masyarakat bisa memahami keberadaan investasi perusahaan dan kontribusinya bagi negara. Sekaligus masyarakat juga bisa berperan aktif apabila para perusahaan melakukan suatu tindakan pelanggaran.

“Nanti tugas kita menegur dan mengingatkannya. Ngga perlu membuat aksi-aksi yang dapat mengganggu kegiatan di pelabuhan, apalagi sampai mendesak perusahaan ditutup. Karena yang rugi bukan perusahaan saja tapi juga negara,” pintanya.

Sebelumnya, warga yang bermukim di sekitar Marunda meminta perusahaan-perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat, yakni dalam hal kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami apresiasi apa yang digagas dan pola komunikasi aktif yang dilakukan KSOP. Keberadaan KCN sudah banyak berbuat mulai dari membuka lapangan kerja bagi masyarakat Marunda, menyalurkan CSR-nya langsung ke masyarakat serta mengikuti aturan yang ditentukan KSOP,” kata Ketua Ikatan Solidaritas Anak Marunda Bachtar. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PEMAKAMAN ARIFIN PANIGORO

Mantan Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) berjalan aksi menghadiri proses persemayaman dan pemakaman almarhum Arifin Panigoro di taman pemakaman keluarga di Jalan Benda, Cilandak, Jakarta, Selasa (8/3). Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Arifin Panigoro meninggal dunia di Amerika Serikat pada Minggu (27/2) waktu setempat karena sakit.

Menteri PUPR: Normalisasi Kali Bekasi Ditargetkan Rampung Pertengahan 2023

Pekerjaan normalisasi tersebut merupakan upaya penanganan banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua Kali, yakni Cileungsi dan Cikeas.

JAKARTA (IM) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan normalisasi Kali Bekasi bisa tuntas pertengahan 2023 mendatang. Hal ini diungkapkannya saat meninjau pekerjaan Pengendalian Banjir Kali

Bekasi paket I.

Basuki menyebutkan pekerjaan normalisasi tersebut merupakan upaya penanganan banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya Kali Bekasi yang merupakan pertemuan dua Kali, yakni Cileungsi dan Cikeas.

Basuki menginstruksikan agar segera dilaksanakan pekerjaan pengerukan endapan di Kali Bekasi untuk memperlancar aliran air ke hilir, dengan tetap memperhatikan desain struktur pada area-area yang dilewati utilitas air bersih.

“Hal ini agar tidak diperlukan relokasi utilitas karena memerlukan waktu dan biaya tambahan. Saat ini lokasi-lokasi utilitas yang masih tertinggal diupayakan dengan desain lain yang sesuai kondisi di lapangan, diminta ke konsultan untuk menghitung design alternatif sehingga tidak perlu merelokasi utilitas,” kata Ba-

suki, dalam keterangannya, Selasa (8/3).

Basuki menyatakan Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut, utamanya terkait pembebasan lahan. Khusus untuk lahan yang milik pengembang perumahan, Basuki menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk membuat surat pemberitahuan ke pengembang bahwa akan dikerjakan pembangunan tanggul.

Sehingga pengembang dapat menerima sebagian lahan milik mereka dapat dipakai tanpa proses pembebasan lahan, karena pembangunan tanggul/parapet untuk mengamankan perumahan sekitar. Ia juga meminta pekerjaan tambahan struktur pada Dinding Penahan Tanah (DPT) eksisting di titik Kemang Express yang perlu tambahan kekuatan, dengan tidak membongkar DPT existing tersebut. Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air

(SDA) Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia menyampaikan, jika pembebasan lahan berjalan lancar, maka penyelesaian pekerjaan bisa dipercepat selesai di pertengahan atau akhir tahun 2023.

Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah melakukan kegiatan Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket I (Bendung Bekasi-Pertemuan Sungai Cileungsi- dan Cikeas (P2C)), Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, dari total tujuh paket.

Untuk Pengendalian Banjir Kali Bekasi paket 1 pekerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor Kontraktor pelaksana PT. Adhi Karya dan PT. Nindya Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp591 miliar dan progres fisik 37%. Sementara bertindak sebagai konsultan supervisi PT Wiratman Associate -PT Indra Karya-PT Hilmy,KSO dengan nilai kontrak konsultan nilai Rp24,1 miliar. Pekerjaannya telah dimulai sejak awal 2021 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. ● yan

Pemprov DKI Teliti Fenomena Pergeseran Tanah di Jakarta

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, pergeseran tanah di DKI Jakarta menjadi ancaman dan perhatian selain banjir, gempa, dan lainnya. Menurut dia, pergeseran tanah menjadi hal baru yang ditangani Pemprov DKI Jakarta.

“Pergeseran tanah ini kan sesuatu yang baru ya. Dinas terkait dan lurah serta camat telah melakukan penelitian terkait fenomena ini,” kata Riza kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut dia, pergeseran tanah akan diantisipasi lebih jauh oleh dinas terkait. Meskipun, dia mengaku belum memiliki pemahaman dan panduan baru terkait pergerakan tanah yang mulai muncul di

DKI Jakarta.

“Yang ada, baru terkait pengendalian banjir. Semua bencana kita inventarisir, data, teliti, evaluasi,” ujarnya.

Meski klaim Riza pergeseran tanah hal baru, Kementerian ESDM pada 2018 lalu sempat menyampaikan hal serupa. Bahkan, hal tersebut juga sempat diinformasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Moh Insaf, mengatakan, ada informasi terkini dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) Kementerian ESDM, soal zona menengah di DKI. Menurut Insaf, zona menengah tersebut adalah

zona dengan pergerakan tanah yang diakibatkan karena curah hujan di atas normal.

“Terutama di daerah yang terbatas dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan, atau lereng jika mengalami gangguan,” kata Insaf dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/3).

Menurut dia, ada 10 lokasi di DKI yang memiliki potensi tersebut, khususnya di dua kota administratif, Jakarta Selatan dan Timur. Khusus di Jakarta Selatan mencakup Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan.

“Sedangkan, di Jakarta Timur, lokasinya di Kramat Jati, dan Pasar Rebo,” ujarnya. ● yan

Kasus Covid-19 Menurun, Plt. Bupati Harap PPKM Turun ke Level 2

FOTO: DOK. PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (dua kanan) saat mengikuti Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Senin (7/3).

CIKARANG PUSAT (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Akhmad Marjuki, berharap Kabupaten Bekasi dapat segera masuk ke PPKM Level 2, mengingat kasus Covid-19 di wilayahnya yang mulai menurun. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat secara virtual, di Command Center Gedung Dis-

kominfosantik, Senin (7/3).

“Baru saja kita selesai mengikuti rapat terkait perkembangan vaksinasi dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Di Kabupaten Bekasi kasusnya sudah jauh menurun dan mudah-mudahan turun terus sehingga dalam waktu dekat PPKM bisa segera ke level 2,” ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Senin (7/3) malam. Dirinya menambahkan,

turunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang baik oleh masyarakat dan capaian vaksinasi baik dosis kedua maupun ketiga yang terus meningkat.

“Kita berhasil menekan angka kenaikan kasus karena protokol kesehatan yang terus kita jalankan. Selain itu, capaian vaksinasi kita juga terus meningkat, dapat dilihat bahwa untuk dosis kedua saja kita sudah di atas 70%,” terangnya.

Tidak hanya itu, pada rapat tersebut dirinya bersama seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat menerima arahan untuk terus memperketat protokol kesehatan, meningkatkan capaian vaksinasi dosis kedua dan ketiga, memeriksa data penyebab kematian Covid-19, serta rutin memperbarui data kasus Covid-19.

“Ada beberapa arahan terutama bagi daerah yang masih tinggi kasusnya, yaitu diutamakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan meningkatkan lagi vaksinasi kedua dan ketiga,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Kepala Dinas UMMK Kabupaten Bekasi, serta secara virtual Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Pangdam Jayakarta, dan Kepala Daerah se-Jawa Barat. ● mdl

FOTO: ANI



AKSI PERAYAAN HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL 2022

Sejumlah relawan perempuan Greenpeace melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa (8/3). Aksi tersebut dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional 2022 yang mengusung tema secara global “Break The Bias”.

BPJS Kesehatan: Cakupan Peserta JKN di DKI Lebih Cepat dari Target

JAKARTA (IM) - BPJS Kesehatan Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencatat cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DKI Jakarta mencapai 11,06 juta. Angka itu lebih cepat dari target RPJMN 2024.

“DKI Jakarta tiga tahun sebelum 2024 sudah mencapai cakupan lebih dari 98 persen,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, Bonna Evita dalam dialog virtual soal akses jaminan kesehatan di Jakarta, Selasa (8/3).

Ia menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diharapkan cakupan peserta JKN di DKI mencapai 98 persen. Namun realisasinya lebih cepat, yakni pada 2021 sudah mencapai 98,39 persen atau 11,06 juta jiwa dari total jumlah penduduk pada semester pertama 2021 mencapai 11,24 juta jiwa.

Dari realisasi itu, sebanyak 4,73 juta orang peserta di antaranya adalah dari kategori

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, 4,03 juta adalah peserta dari Pekerja Penerima Upah (PPU), 1,14 juta adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBBU sebanyak 936 ribu dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 216 ribu orang.

“Proporsi terbanyak yang didaftarkan pemda, iurannya dari APBD sebanyak Rp4,7 juta,” katanya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiantoro menambahkan, capaian tersebut didukung Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data PBBU yang didaftarkan Pemprov DKI. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja DKI yang memastikan pekerja di Ibu Kota sudah terdaftar JKN.

“Capaian ‘universal health coverage’ tidak terlepas dari visi dan misi Pemprov DKI, yaitu menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga,” kata politisi PKS DKI Jakarta itu. ● yan